

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK

Studi Kepemimpinan Politik Perempuan Partai Solidaritas Indonesia

Di Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta

Tahun 2020 – 2021

DISUSUN OLEH : Mutiara Sari, Robert Mubarrod S.IP, M.IP

Email: mutiarasari.0802@gmail.com, tarrodbert@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas eksistensi kepemimpinan politik perempuan dalam Partai Politik Solidaritas Indonesia. Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk mencapai keseimbangan gender, peran perempuan dalam politik diyakini dapat memberikan perubahan positif pada proses pembuatan kebijakan atau undang-undang yang lebih baik untuk masyarakat agar tidak bias gender. Dalam UU No 2 Tahun 2008 pasal 20 juga termaktub bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Eksistensi perempuan dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta tidak terlepas dari kemampuan wanita dalam memberikan gagasan dan ide yang dibutuhkan untuk perkembangan bangsa. Dalam hal ini perlu adanya perhatian dan pelatihan khusus bagi para perempuan melalui partai politik sehingga para kaum perempuan memiliki akses untuk berperan aktif dalam politik di Indonesia. Untuk menjelaskan fenomena kepemimpinan politik perempuan dalam Partai Politik PSI. Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif analisis serta dengan teknik pengumpulan data wawancara sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder.

Kata Kunci : Kepemimpinan Politik, Perempuan, Partai Solidaritas Indonesia

Pendahuluan

Pada beberapa dekade terakhir ini kita sering mendengar sebuah kata tentang kesetaraan gender yang diidentikkan dengan keinginan yang sama dari perempuan agar sejajar dengan kaum laki-laki dalam segala domain aktivitas sehari-hari, termasuk dalam dunia politik dan pemerintahan, dan tentunya perempuan ingin terlibat aktif dalam segala aspek kehidupan; politik, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Namun dalam ruang-ruang tertentu, tidak ketinggalan juga pembahasan mengenai perempuan yakni sebagai kaum maskulin dan feminin.¹

Partai politik menurut Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, mempunyai nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya.²

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah partai politik di Indonesia yang didirikan pasca Pemilu tahun 2014. Partai ini diketuai oleh Giring Ganesha sejak 16 November 2021. Partai ini cenderung mengambil target partisipan kalangan anak muda, perempuan, dan lintas agama. Pada Pemilu tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum menyatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memenuhi semua persyaratan dan lolos sebagai partai peserta Pemilu 2019. PSI dinyatakan lolos dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi, yakni 66,66 persen. Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka mengatakan, hal itu dapat tercapai karena partainya berkomitmen ingin mewakili kaum perempuan.³

¹Imron Wasi, S.Sos (2020), *Politik, Partai Politik, & Perempuan. Frontstage and Backstage. Sebuah Catatan*, (Jakarta: CV Budi Utama), hlm. 20

², *Ibid*, hlm. 14

³<https://www.liputan6.com/news/read/3296075/psi-partai-baru-yang-lolos-dengan-keterwakilan-perempuan-tertinggi> yang diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 22.23 WIB.

Dari penjelasan diatas maka penelitian ini mengambil tema bagaimana eksistensi perempuan di dalam kepemimpinan politik dan bagaimana kepemimpinan politik kaum perempuan pada Partai Solidaritas Indonesia khususnya di Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Tahun 2020 – 2021

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan Fred Fiedler (1967). kepemimpinan secara umum diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, memimpin, menggerakkan, mengarahkan dan bila perlu memaksa orang lain atau kelompok lain untuk menerima pengaruh itu dan selanjutnya kemudian menciptakan sesuatu yang membantu untuk mencapai sesuatu yang telah ditetapkan.⁴ Fiedler (1967), mengatakan teori kepemimpinan merupakan pola hubungan antara individual yang menggunakan wewenang dan pengaruhnya terhadap kelompok agar bekerjasama untuk mencapai tujuan.

Fred Fiedler mengembangkan apa yang dikenal dengan *Contingency Model of Leadership*. Fiedler terkenal sebagai orang pertama ahli teori manajemen yang mengatakan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi. Gaya kepemimpinan ini berhubungan dengan pertemuan antara pemimpin dengan situasi yang paling cocok. Teori ini menekankan penggunaan gaya yang berbeda atas kepemimpinan yang cocok terhadap kebutuhan yang diciptakan oleh situasi organisasi yang berbeda. Gaya kepemimpinan dapat berupa motivasi tugas atau motivasi hubungan. Pemimpin tugas adalah utamanya berkenaan dengan pencapaian tujuan, sebaliknya pemimpin hubungan adalah berkenaan dengan pengembangan hubungan interpersonal yang dekat.

⁴Hasan Hariri, Ridwan, Dr. Dedy H. Karwan (2017), *Evolusi Pendekatan Teori Kepemimpinan Menuju Kepemimpinan Efektif*, (Yogyakarta: Expert), hlm. 1-2.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan masalah dan fokus penelitian. Metode kualitatif adalah langkah-langkah penelitian sosial untuk memperoleh data deskriptif berupa teks dan gambar. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Lexy J. Moleong, bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, bukan angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang tidak menggunakan dasar kerja statistik, tetapi didasarkan pada bukti kualitatif.

Metode kualitatif adalah studi yang menunjukkan prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang dan perilaku yang diamati. Dalam hal ini peneliti menafsirkan dan menginterpretasikan data yang diperoleh peneliti dari wawancara, observasi, rekaman untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan secara rinci dan jelas.

Menurut Moleong, metode penelitian kualitatif mengacu pada suatu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang berkaitan dengan pengalaman yang dipelajari, seperti tingkah laku, pengamatan, motivasi, tindakan, dan lain-lain, menggambarkannya secara holistik dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang wajar bila menggunakan metode ilmiah.⁵ Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah kegiatan yang menempatkan penelitian ke dunia.⁶

⁵Moleong (2006), "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", edisi revisi.

⁶Creswell (2018), "*Penelitian Kualitatif & Desain Riset*", hlm 58.

Pembahasan

Keterwakilan Perempuan Di Dewan Pimpinan Wilayah PSI

Dekade terakhir telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam perkembangan politik perempuan di berbagai belahan dunia. Hal ini tentunya dapat dijadikan sebagai mata rantai dalam komponen calon perempuan untuk melancarkan kembali dirinya dalam persaingan politik praktis. Meningkatnya tren perempuan dalam jabatan publik tentunya memberikan banyak harapan bagi calon legislatif perempuan di Indonesia.⁷ Pada dasarnya perempuan dihadapkan pada adanya nilai dan norma yang berkembang dalam suatu bidang tertentu yang memiliki karakteristik berbeda dengan bidang lainnya. Dan perempuan mampu beradaptasi dengan lingkungannya dalam perkembangannya baik dari privat maupun publik.⁸

Hak hak perempuan dalam politik meningkat. Ini mendapat pengakuan representatif dari berbagai kalangan dan pemerhati. Secara konstitusional Dalam UU No 2 Tahun 2008 pasal 20 juga termaktub bahwa kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-masing. Peluang ini menjadi poros utama perempuan dalam kegiatan khusus untuk memanfaatkan peluang. Perempuan harus mempersiapkan diri untuk meningkatkan kualitas dan keahliannya serta ketrampilannya agar dapat berpartisipasi dalam pemberdayaan melalui organisasi politik untuk mengambil langkah-langkah positif yang dapat direpresentasikan kepada rakyat dalam keputusan politik yang positif untuk kesejahteraan rakyat yang lebih baik,⁹ (ikut berperan aktif dalam perumusan kebijakan dan undang-undang).

⁷Imron Wasi, S.Sos (2020), *Politik, Partai Politik, & Perempuan. Frontstage and Backstage. Sebuah Catatan*, (Jakarta: CV Budi Utama), hlm. 73.

⁸*Ibid*, hlm. 74

⁹Nurhidayah (2012), *Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan Kebijakan. Journal of Educational Social Studies*, JESS Vol. 1, No. 1, hlm. 14.

Berbicara keterwakilan perempuan di parlemen berarti berbicara tentang keterwakilan deskriptif dan substantif. Representasi deskriptif adalah bentuk representasi yang didasarkan pada kesamaan antara perwakilan dan yang diwakili dalam hal ini masyarakat. Representasi substantif adalah konsep representasi yang menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perwakilan sesuai dengan kepentingan yang diwakilinya.¹⁰

Partai Solidaritas Indonesia merupakan kekuatan politik baru yang ingin mengembalikan politik pada tempat yang semestinya. PSI lahir dari pengetahuan bahwa politik adalah tugas mulia untuk menciptakan kebahagiaan bagi semuanya. PSI berdiri pada tanggal 16 November 2014. Oleh karena itu, PSI bertekad mengakhiri pergolakan politik dengan mengembalikan nilai-nilai luhur politik. PSI ingin mengembalikan politik pada nilai-nilai luhur untuk menghasilkan negarawan yang pemikirannya dan tindakannya didasarkan pada kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang lebih besar dan jangka panjang, bukan hanya kepentingan politik pribadi jangka pendek.

PSI mempunyai tekad untuk mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik agar para kaum perempuan dapat terus menyuarakan suaranya di dalam perpolitikan dan juga dalam lingkup umum.

Pada tahun 2021 jumlah kepengurusan partai di DPW PSI ada 7 posisi jabatan dimana 3 posisi jabatan diduduki oleh kaum perempuan. (Tabel.1)

No.	Nama	Jabatan
1.	Michael Victor Sianipar	Ketua
2.	Mi'raj Yusuf Al Farisy	Wakil Ketua I
3.	Muhammad Fathony	Wakil Ketua II

¹⁰Agus Hiplunudin (2019), *Politik Gender* (Yogyakarta: Suluh Media), hlm. 58.

4.	Elva Farhi Qolbina	Sekretaris
5.	Allya Natasya Aurora	Wakil Sekretaris
6.	Andrew Darmawan	Bendahara
7.	Dina Triana	Wakil Bendahara

Tabel 1 Struktur Kepengurusan DPW PSI DKI Jakarta

Sumber: Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta (Lampiran 6)

Hal ini memberikan gambaran bahwa presentase pengurus perempuan dalam kepengurusan melebihi 30% kuota keterwakilan perempuan di ranah politik. Hal ini dikuatkan oleh keterangan dari Elva Farhi Qolbina:

”Struktur kepengurusan di tingkat DPW ada 7 posisi dengan posisi pengurus perempuan ada 3. Secara total kepengurusan memang harus memenuhi kuota sebanyak minimal 30%. Di Partai Solidaritas Indonesia sendiri untuk kaum perempuan kuota yang ada sudah melebihi 30%, ada sekitar 40%-50% kuota kaum perempuan di Partai Solidaritas Indonesia.”¹¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam struktur kepemimpinan DPW PSI sangat konsisten untuk kaum perempuan dalam berpolitik dan sudah memenuhi syarat kuota 30%, artinya keterwakilan perempuan di DPW PSI bukan sekedar khayalan melainkan sebuah fakta yang harus diapresiasi dengan baik.

Rancangan Kebijakan Di Dewan Pimpinan Wilayah PSI

Merumuskan masalah kebijakan merupakan salah satu langkah yang paling krusial dalam penelitian kebijakan publik, karena banyak pengambil keputusan yang gagal menyelesaikan masalah publik bukan karena metode penyelesaian masalah yang salah, tetapi karena masalah yang diselesaikan salah. Seperti yang dikatakan Russel L. Arkoff, kesuksesan dalam memecahkan masalah membutuhkan solusi yang tepat untuk

¹¹Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang dilakukan di kantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023.

masalah yang tepat. Namun menurut Arkoff, hal yang lebih sering membuat gagal dengan menyelesaikan masalah yang salah daripada menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang tepat.¹²

Tahap perumusan kebijakan merupakan tahapan kritis dalam proses kebijakan. Ini tentang proses dimana pembuat keputusan memilih kebijakan alternatif, biasanya mempertimbangkan efek langsung dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya mengungkapkan dan mendistribusikan kekuasaan dan daya tarik antara kepentingan sosial, politik dan ekonomi yang berbeda. Fase perumusan kebijakan melibatkan identifikasi dan/atau kombinasi tindakan alternatif untuk mengatasi masalah dan mempersempit solusi dalam persiapan untuk penentuan kebijakan akhir.¹³

Pembuatan kebijakan adalah pengembangan kebijakan yang efektif dan dapat diterima untuk menangani isu-isu dalam rancangan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan harus melalui tahap analisis. Perencanaan kebijakan dan berbagai alternatif pilihan kebijakan harus dianalisis untuk menemukan kebijakan yang paling tepat, efektif dan realistis untuk mengatasi masalah tersebut. Beberapa model analisis dalam pembuatan kebijakan, misalnya: analisis efektivitas biaya, model multiobjektif, analisis keputusan (*Decision Analysis*), analisis sistem (*System Analysis*), penelitian tindakan dan teknik kelompok nominal.¹⁴

Pada rentang waktu tahun 2020-2021 Partai Solidaritas Indonesia di DPW bersama dengan tim kerja beserta fraksi membuat sebuah rancangan kebijakan yang berfokus pada kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Dalam membuat rancangan kebijakan tersebut semua pengurus turut andil untuk memberikan ide-ide baru dan pengurus perempuan pun banyak yang ikut mengambil bagian dalam

¹²Evi Satispi & Kurniasih (2019), *Buku Ajar Kebijakan Publik (Teori Dan Aplikasinya)*, (Jakarta: UMI Press), hlm. 129.

¹³Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani (2016), *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, Jurnal Review Politik, Vol. 06, No. 2, (Desember), hlm. 210.

¹⁴*Ibid*,

menyusun rancangan kebijakan tersebut. Sampai pada akhirnya lahirnya sebuah rancangan kebijakan yang bernama BUKU SAKU.

Terkait dengan keikutsertaan pengurus perempuan dalam membuat rancangan kebijakan dipaparkan pula oleh Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta:

”Setelah muncul angka affirmative action minimal 30%, menjadi sebuah acuan untuk DPW mengaktifasi peran para perempuan dalam membuat rancangan-rancangan kebijakan. Tidak hanya semata-merta memenuhi kebutuhan kuota itu sendiri. Ada beberapa contoh rancangan-rancangan kebijakan yang dibuat diantaranya membuat platform yang menjadi DNA nya Partai Solidaritas Indonesia bersama fraksi yang berfokus pada kekerasan seksual pada perempuan dan anak yang kemudian platform tersebut menjadi sebuah BUKU SAKU.”¹⁵

Dengan demikian, paparan diatas menunjukkan bahwa para pengurus perempuan di DPW PSI terlibat dalam menyusun rancangan kebijakan partai. Para pengurus perempuan turut andil bukan hanya pada saat menyusun rancangan kebijakan namun juga dalam memberikan ide-ide serta gagasan-gagasan hingga rancangan kebijakan tersebut akhirnya menjadi sebuah kebijakan yang bermanfaat bagi sesama.

Implementasi Kebijakan Di Dewan Pimpinan Wilayah PSI

Pemahaman umum tentang implementasi kebijakan dapat ditemukan dalam pernyataan Grindle bahwa implementasi adalah suatu proses administrasi umum yang dapat dilihat pada tingkat program tertentu proses implementasi dimulai hanya ketika tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program aksi dibangun, sumberdaya disiapkan dan dialokasikan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan terkait antara tujuan kebijakan dan implementasinya dengan hasil kegiatan. Setiap kebijakan yang dibuat harus dilaksanakan. Implementasi kebijakan diperlukan karena pada tahap inilah dapat dilihat “ kesesuaian” berbagai faktor bagi keberhasilan implementasi kebijakan atau

¹⁵Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang dilakukan di kantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023.

program tersebut. Alasan perlunya implementasi kebijakan adalah untuk menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan aksi, interaksi dan reaksi dari para pelaksana kebijakan.¹⁶

Rumusan lebih rinci tentang kebijakan praktik dikutip oleh Winarno adalah bahwa penegakan kebijakan adalah:

“Tahap pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Jika kebijakan tidak sesuai/tidak dapat mereduksi masalah yang menjadi sasaran kebijakan, kebijakan tersebut bisa saja gagal, meskipun kebijakan itu dilaksanakan dengan benar.” (Edward III dalam Winarno, 2007:174).¹⁷

Pengaruh konteks implementasi terlihat setelah kebijakan diimplementasikan. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan salah satu langkah dan momentum yang sangat penting dalam membentuk atau membuat kebijakan selanjutnya, karena implementasinya menentukan berhasil atau tidaknya kebijakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, kata-kata dari kebijakan yang dibuat tidak memiliki arti atau hanya rangkaian kata-kata yang bagus dan baku yang terekam rapi dalam sebuah dokumen jika tidak dilaksanakan.¹⁸

Dalam prakteknya, implementasi kebijakan harus dilihat penerapan dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Hal ini sesuai dengan pandangan Mazmanian dan Sabatier yang mengemukakan perlunya kerangka analisis implementasi. Menurut perspektif ini, implementasi kebijakan diperlukan untuk menentukan efektivitas dan relevansi kerangka kerja saat ini untuk memandu implementasinya.¹⁹

¹⁶<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf> yang diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 12.06 WIB.

¹⁷Lidwina Galih Puspa Ratna (2011), *Kepuasan Informasi Bagi Kaum Perempuan Pada Media Online Wolipop.com*, E-journal (September), hlm. 6. Yang diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 12.29 WIB.

¹⁸Dr. Nuryanti, S.IP., M.Si (2015), *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*, (Yogyakarta: LeutikaPrio), hlm. 137-138.

¹⁹Novita Tresiana & Noverman Duadji (2021), *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*, (Yogyakarta: Suluh Media), hlm. 12.

Hasil akhir dari implementasi kebijakan setidaknya diwujudkan dalam beberapa indikator, yaitu keluaran yang biasanya tampak dalam bentuk konkrit, hasil yang biasanya tampak dalam rumusan tujuan, seperti tercapainya pemahaman masyarakat atau lembaga, keuntungan atau manfaat, memiliki bentuk, efek atau akibat yang berbeda-beda, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan dan kelompok sasaran, maupun individu dan kelompok.²⁰

Pada proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh DPW PSI dalam hal ini implementasi Buku Saku, sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. DPW PSI melakukan roadshow ke DPD dan DPC untuk mengimplementasikan Buku Saku tersebut. Sebagaimana dipaparkan pula oleh Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta.

”Dalam proses penyusunan Buku Saku, ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunannya termasuk para kaum perempuan di DPW dengan cara berkonsultasi dengan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak, Jakarta Feminis, Lembaga Bantuan Hukum (LBH). DPW dalam hal ini melakukan roadshow ke DPD dan DPC untuk melakukan sosialisasi terhadap para pengurus partai perempuan di tingkat DPD dan DPC. Awalnya Buku Saku ini hanya akan di buka untuk internal Partai Solidaritas Indonesia saja namun akhirnya Buku Saku tersebut di buka untuk umum.”²¹

Dalam hal implementasi kebijakan, para pengurus perempuan di DPW PSI juga banyak terlibat. Sesama perempuan, para pengurus perempuan di DPW PSI ini sangat vokal dalam mengimplementasikan Buku Saku yang memang diperuntukan khusus untuk perempuan dan anak guna menjaga sesama agar terhindar dari tindak kejahatan kekerasan seksual yang korbannya rata-rata adalah perempuan dan anak.

Evaluasi Kebijakan Di Dewan Pimpinan Wilayah Partai PSI

²⁰Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si (2015), *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo), hlm. 16.

²¹Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang dilakukan di kantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023.

Evaluasi pada dasarnya adalah tinjauan terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan dimana pelaksanaan program dimasa yang akan datang diperkirakan, diperhitungkan dan dipantau agar lebih baik lagi. Dengan demikian, evaluasi lebih prediktif daripada kesalahan masa lalu dan bertujuan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program. Evaluasi adalah upaya untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil yang diharapkan secara objektif. Hasil evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik untuk perencanaan ke depan.²²

Evaluasi atau kajian kebijakan merupakan bagian tahap akhir, yaitu kebijakan tidak dapat diabaikan begitu saja tetapi harus dipantau, dan salah satu mekanisme kontrol ini disebut “evaluasi kebijakan”. Evaluasi kebijakan sendiri dilakukan untuk menilai sejauh mana efektivitas kebijakan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang membuatnya. Selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta mencari kekurangan dan menutupi kekurangan.²³

Evaluasi kebijakan adalah evaluasi terhadap beberapa kegiatan yang direncanakan, diputuskan dan dilaksanakan. Dimana tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana kebijakan mencapai tujuan, yang kemudian diperhitungkan dalam evaluasi dan perbaikan implementasi kebijakan tersebut.²⁴

Evaluasi bukanlah hal yang mudah. Para pemangku kepentingan seringkali mengabaikan hal ini. Paling tidak, fokus mereka bukan pada kegiatan evaluasi melainkan pada perumusan, rekomendasi atau pengawasan. Ada banyak hambatan untuk kegiatan evaluasi, termasuk keterbatasan psikologis, keterbatasan keuangan, keterbatasan teknis, keterbatasan politik, keterbatasan sumber daya evaluasi.²⁵

²²Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP (2022), *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi Dan Evaluasi*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru), hlm. 139.

²³Joko Pramono, S.Sos., M.Si (2020), *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: Unisri Press), hlm. 48.

²⁴*Ibid*,

²⁵Subarsono, AG (2005), *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 130-131.

Dalam hal evaluasi implementasi kebijakan di DPW PSI, para pengurus perempuan tidak hanya terlibat dalam membuat rancangan kebijakan, implementasi kebijakan, namun juga terlibat dalam evaluasi implementasi kebijakan tersebut. Para pengurus perempuan di DPW PSI banyak turut andil dalam memberikan evaluasinya. Evaluasi yang diberikan dapat berupa kritik, saran, masukan maupun tambahan. Keadaan ini diperkuat oleh keterangan Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta dan Patriot Muslim selaku Ketua Bappilu DPW PSI DKI Jakarta:

”Sampai saat ini implementasi kebijakan masih terus di evaluasi. Meminta masukan dari teman-teman perempuan, dari pengurus partai dengan mengadakan forum yang bertujuan untuk menjaring evaluasi dari implementasi kebijakan yang sudah dibuat. Pengurus perempuan di DPW banyak terlibat dalam hal membuat rancangan kebijakan, mengimplementasi kebijakan sampai pada mengevaluasi implementasi kebijakan yang sudah dibuat.”²⁶

”Dan dalam hal evaluasi dari implementasi kebijakan yang sudah dibuat, para pengurus perempuan ini banyak mengambil tindakan dan juga andil untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang memang perlu untuk di evaluasi agar menjadi kebijakan yang lebih baik. Sebagai contoh, salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan dengan cara memberikan masukan-masukan secara langsung dalam rapat untuk program-program yang sedang dilaksanakan.”²⁷

DPW PSI masih terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dievaluasi diperbaiki dan dipertajam agar dapat menjadi kebijakan yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk semua.

Eksistensi Perempuan Di Dewan Pimpinan Wilayah PSI

²⁶Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang dilakukan di kantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023.

²⁷Wawancara pribadi dengan Bro Patriot Muslim selaku Ketua Bappilu DPW PSI DKI Jakarta, yang dilakukan di kantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023.

Pada hakekatnya, manusia adalah makhluk politik (*zoon politicon*). Dalam kehidupannya, manusia melakukan interaksi sosial politik antara dua orang atau lebih, guna melakukan kegiatan sosial politik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Plato, manusia adalah bagian *zoon politicon* dan setiap manusia adalah bagian terkecil dari suatu bangsa.²⁸

Partisipasi perempuan dalam politik menjadi penting karena perempuan memiliki kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri. Jika urusan perempuan dipercayakan kepada wakil-wakil yang tidak berpihak pada persoalan perempuan, hampir bisa dipastikan kebijakan yang dibuat tidak sensitif terhadap persoalan perempuan.²⁹

Partisipasi perempuan dalam dunia politik dengan memberikan kuota 30% melalui UU Pemilu No 10 Tahun 2008, beberapa kelompok perempuan menyambut baik wacana ini dengan mengambil langkah untuk membangun momentum bagi perempuan dalam rekrutmen politik perempuan. Keberadaan perempuan merupakan tindakan seseorang atau sekelompok orang, dalam hal ini perempuan, untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk mencapai kesetaraan gender.³⁰

Pada tataran internasional sistem hukum hak asasi manusia internasional, pengakuan hak asasi perempuan sebagai hak asasi manusia didasarkan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada tahun 1947 dan disetujui oleh Majelis Umum PBB yang disahkan pada tanggal 10 Desember 1948. Deklarasi ini merupakan awal dari kodifikasi standar pengakuan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan. Diantara hak-hak yang diproklamasikan adalah persamaan, kebebasan dan keamanan bagi semua, hak untuk bebas dari perbudakan, penyiksaan atau

²⁸Sandy Diana Mardlatillah (2020), *Perempuan Dan Politik : Peran Perempuan Dalam Dunia Politik Periode 2009-2019*, Jurnal Equalita Vol. 4 Issue 2, hlm. 162.

²⁹Very Wahyudi (2018), "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam* 1: 1 (Januari-Juni), hlm. 63-83.

³⁰*Ibid*, hlm 255

perlakuan merendahkan martabat, untuk diakui sebagai individu dihadapan hukum, atas keadilan, kebebasan berbicara dan partisipasi politik.³¹

Peran utama perempuan dalam politik harus diperkuat dan diperdalam. Penguatan mengacu pada kuantitas dan kualitas kepemimpinan politik. Diperdalam artinya peran kepemimpinan perempuan dalam politik diperluas tidak hanya di lembaga-lembaga negara, tetapi juga di lembaga-lembaga politik lainnya seperti partai politik dan parlemen.³² Pada dasarnya ada berbagai cara rekrutmen politik yang berbeda-beda sesuai dengan budaya politik yang ada di dalam partai itu sendiri, namun idealnya pemilihan partai tidak boleh berdasarkan asmara, dimana anggota partai adalah kelompoknya sendiri, sama-sama keluarga, dan garis kelas. Mengenai keanggotaan partai perempuan, undang-undang yang berlaku saat ini tentang pembentukan, perekrutan dan pengangkatan anggota parlemen mensyaratkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.³³

Merujuk pada angka affirmative action kuota sebesar 30% dalam hal ini Partai Solidaritas Indonesia menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina, sudah mencapai angka 40%-50% untuk pengurus perempuan. Dimana kuota untuk pengurus perempuan di PSI sudah melampaui ketentuan. Selain memang sudah melampaui ketentuan kuota, para pengurus perempuan di PSI ini banyak menunjukkan eksistensi nya dalam kancah politik. Pada tahun 2021 jumlah kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia di DPW ada 7 posisi, dimana 3 diantaranya adalah pengurus perempuan. Pengurus perempuan ini menduduki jabatan yang strategis dalam kepengurusan partai yakni sebagai sekretaris, wakil sekretaris dan wakil bendahara. Eksistensi pengurus perempuan ini menjadi relevan dengan teori kepemimpinan Fred Fiedler. Fred Fiedler mengembangkan teori kontingensi dimana

³¹*Ibid*, hlm 258

³²Diah Y. Suradiredja & Syafrizaldi Jpang (2019), *Perempuan Di Singgasana Lelaki (Atlas Pemimpin Perempuan Indonesia)*, (Jakarta: Kompas Gramedia), hlm. 226.

³³Ida Farida (2019), *Gerakan Politik Gender (Perspektif Sumber Daya Manusia Dan Organisasi)*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama), hlm. 160.

efektifitas kepemimpinan bergantung pada situasi. Gaya kepemimpinan dapat berupa motivasi tugas atau motivasi hubungan. Motivasi tugas yang diemban oleh pengurus perempuan di DPW PSI mampu membuat situasi membaik, dari wakil sekretaris menjadi sekretaris dan dari sekretaris menjadi ketua. Sebagaimana diungkapkan juga oleh Elva Farhi Qolbina:

”Di Partai Solidaritas Indonesia sendiri untuk kaum perempuan kuota yang ada sudah melebihi 30%, ada sekitar 40%-50% kuota kaum perempuan di Partai Solidaritas Indonesia. Banyak dari pengurus perempuan Partai Solidaritas Indonesia yang memiliki kompetensi. Baik itu kompetensi di lapangan maupun kompetensi secara administrasi. Pada tingkat DPW, kebutuhan pengurus perempuan lebih ke konseptor dan yang paling penting adalah para pengurus-pengurus partai ini memiliki komunikasi yang baik. Dalam Partai Solidaritas Indonesia para kaum perempuan cukup merepresentasikan. Dalam struktur kepengurusan partai di DPW, para kaum perempuan yang menjabat tidak hanya dari 1 golongan. Namun ada dari beberapa golongan. Kepemimpinan perempuan dalam Partai Solidaritas Indonesia di DPW juga akan terus berusaha untuk mengoptimalkan posisi yang sudah dicapai. Selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta meyakinkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia ini akan menjadi partai yang nyaman khususnya untuk kaum perempuan.”³⁴

Dan diperkuat oleh keterangan Patriot Muslim:

”Untuk jumlah kepengurusan Partai Solidaritas Indonesia kaum perempuan sudah memenuhi kuota sebanyak minimal 30% sesuai dengan Undang-Undang. Para pengurus perempuan ini sangat cukup untuk bisa merepresentasikan kaum perempuan itu sendiri dalam partai. Apabila dilihat dari segi latar belakang para perempuan didalam Partai Solidaritas Indonesia, mereka muncul dari berbagai kalangan seperti aktivis, profesional dll. Pun di lihat dari soal isu-isu gender, para kalangan ini dapat dikatakan cukup melek tentang isu-isu politik yang ada. Sehingga kepemimpinan perempuan dalam Partai Solidaritas Indonesia dapat dikatakan yang paling berani berbeda dan paling progresif. Dan hal itulah cukup membuat

³⁴Wawancara pribadi dengan Sis Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang dilakukan di kantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023.

kepemimpinan di Partai Solidaritas Indonesia ini berbeda dengan partai politik lainnya.”³⁵

Penjelasan diatas bahwa eksistensi perempuan dalam politik khususnya di Partai Solidaritas Indonesia sangat eksis karena dapat melampaui kuota 30%. Eksistensi para pengurus perempuan dalam kepengurusan partai politik di DPW PSI tidak perlu diragukan lagi karena pengurus perempuan tidak hanya sekedar hadir namun juga para pengurus perempuan yang memiliki kompetensi dan perannya tersendiri dalam partai. Kompetensi yang dimiliki membawa para pengurus perempuan ini kedalam jabatan yang strategis. Peran pengurus perempuan juga menjadikan partai PSI semakin maju.

Simpulan

Berdasarkan paparan diatas serta hasil dari wawancara dengan Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta dan Patriot Muslim selaku Ketua Bappilu DPW PSI DKI Jakarta terkait eksistensi perempuan dalam politik di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa Kuota 30% perempuan yang berpolitik di DPW PSI DKI Jakarta sudah mencapai syarat yang ditentukan UU dan bahkan lebih. Selain melampaui kuota, kepengurusan Politik perempuan di Partai Solidaritas Indonesia juga telah menunjukkan eksistensinya di ranah politik. Pada tahun 2021 struktur kepengurusan partai di DPW PSI DKI Jakarta terdiri dari 7 posisi, yakni ketua, wakil ketua, wakil ketua I, wakil ketua II, Sekretaris, wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara yang dimana pada 3 posisi strategis dari 7 posisi dalam struktur kepengurusan diduduki oleh perempuan sebagai berikut, posisi sekretaris di jabat oleh Elva Farhi Qolbina yang kemudian pada tahun 2023 ini beliau naik jabatan ke posisi top yakni ketua DPW PSI DKI Jakarta. Posisi selanjutnya

³⁵Wawancara pribadi dengan Bro Patriot Muslim selaku Ketua Bappilu DPW PSI DKI Jakarta, yang dilakukan dikantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023.

adalah wakil sekretaris dijabat oleh Allya Natasya Auror yang pada tahun 2023 ini sudah naik posisi jabatan sebagai sekretaris dan yang terakhir posisi wakil bendahara yang dijabat oleh Dina Triana. Dalam hal ini eksistensi para pengurus perempuan di dalam kepengurusan partai sudah terbukti eksis dengan baik, tidak hanya pada posisi jabatan namun juga karena kompetensi yang dimiliki oleh para pengurus perempuan pada bidangnya yang membuat keberadaannya semakin eksis

Kepemimpinan politik perempuan di DPW PSI DKI Jakarta cukup berbeda dengan kepemimpinan partai politik lain dimana pada posisi ketua dijabat oleh seorang perempuan yang bernama Elva Farhi Qolbina dan pada tingkat provinsi, Partai Solidaritas Indonesia ini adalah satu satunya partai politik yang pemimpinnya adalah perempuan. Kehadiran pengurus perempuan di DPW PSI DKI Jakarta tidak hanya sekedar memenuhi kuota 30%, namun pengurus perempuan ini juga ikut serta dalam perumusan rancangan kebijakan dengan menerapkan praktik-praktik kebijakan yang sudah dibuat dan juga mengevaluasi kebijakan yang sudah berjalan di tubuh Partai.

Daftar Pustaka

A. Buku

Imron Wasi, S.Sos (2020), *Politik, Partai Politik, & Perempuan. Frontstage and Backstage. Sebuah Catatan*. Jakarta: Penerbit CV Budi Utama.

Hasan Hariri, Ridwan, Dr. Dedy H. Karwan (2017), *Evolusi Pendekatan Teori Kepemimpinan Menuju Kepemimpinan Efektif*. Yogyakarta: Penerbit Expert.

Moleong (2006), "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", edisi revisi.

Creswell (2018), “*Penelitian Kualitatif & Desain Riset*”.

Agus Hiplunudin (2019), *Politik Gender*. Yogyakarta: Penerbit Suluh Media.

Evi Satispi & Kurniasih (2019), *Buku Ajar Kebijakan Publik (Teori Dan Aplikasinya)*. Jakarta: Penerbit UMJ Press.

Dr. Nuryanti, S.IP., M.Si (2015), *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: Penerbit LeutikaPrio.

Novita Tresiana & Noverman Duadji (2021), *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. Yogyakarta: Penerbit Suluh Media.

Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si (2015), *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik (Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas)*. Gorontalo: Penerbit UNG Press Gorontalo.

Dr. Dian Suluh Kusuma Dewi, M.AP (2022), *Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi Dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

Joko Pramono, S.Sos., M.Si (2020), *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Surakarta: Penerbit Unisri Press.

Subarsono, AG (2005), *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Diah Y. Suradiredja & Syafrizaldi Jpang (2019), *Perempuan Di Singgasana Lelaki (Atlas Pemimpin Perempuan Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Kompas Gramedia.

Ida Farida (2019), *Gerakan Politik Gender (Perspektif Sumber Daya Manusia Dan Organisasi)*. Yogyakarta: Penerbit Lontar Mediatama.

B. Jurnal

Nurhidayah (2012), *Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Dalam Pengambilan Kebijakan*. *Journal of Educational Social Studies*, JESS Vol. 1, No. 1.

Sholih Muadi, Ismail MH, Ahmad Sofwani (2016), *Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*, *Jurnal Review Politik*, Vol. 06, No. 2, (Desember).

Lidwina Galih Puspa Ratna (2011), *Kepuasan Informasi Bagi Kaum Perempuan Pada Media Online Wolipop.com*, *E-journal* (September), hlm. 6. Yang diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 12.29 WIB.

Sandy Diana Mardlatillah (2020), *Perempuan Dan Politik : Peran Perempuan Dalam Dunia Politik Periode 2009-2019*, Jurnal Equalita Vol. 4 Issue 2.

Very Wahyudi (2018), “*Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender*,” Politea: Jurnal Politik Islam 1: 1 (Januari-Juni).

C. Wawancara

Wawancara pribadi dengan Elva Farhi Qolbina selaku Ketua DPW PSI DKI Jakarta, yang dilakukan di kantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023.

Wawancara pribadi dengan Patriot Muslim selaku Ketua Bappilu DPW PSI DKI Jakarta, yang dilakukan di kantor DPW PSI DKI Jakarta pada tanggal 6 Juli 2023.

D. Internet

<https://www.liputan6.com/news/read/3296075/psi-partai-baru-yang-lolos-dengan-keterwakilan-perempuan-tertinggi> yang diakses pada tanggal 13 April 2022 pukul 22.23 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf> yang diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 12.06 WIB.